

MIGRASI MANUSIA DI ASIA PASIFIK DAN IMPLIKASINYA

Poltak Partogi Nainggolan*

Naskah diterima: 6 Oktober 2014

Naskah direvisi: 17 November 2014

Naskah disetujui: 21 November 2014

Abstract

Current global situation is marked by people migration involving large numbers non-state actors, particularly in Asia-Pacific. People's activities across regions in various forms, i.e. the flows of legal and illegal migrants, migrant workers, refugees, and radical groups, and cases of people smuggling etc, have brought about further implications to state-relations and stability in the region. This essay is part of a qualitative research report which uses writing sources and in-depth interviews. Its analysis reveals a more intensive activities of non-state actors which threat states stability and their relations each other.

Keywords: migration, stability regional, terrorism, migrant workers, Asia-Pacific

Abstrak

Perkembangan situasi global dewasa ini ditandai dengan meningkatnya migrasi manusia, yang melibatkan aktor non-negara secara masif, terutama di Asia Pasifik. Aktivitas manusia lintas-kawasan dalam berbagai bentuk, seperti masuknya imigran legal dan ilegal, aksi penyelundupan manusia, masuknya tenaga kerja migran, pengungsi, dan kelompok radikal, serta kasus-kasus penyelundupan manusia dan lain-lain telah membawa implikasi lebih jauh terhadap hubungan antar-negara dan stabilitas di kawasan tersebut. Tulisan ini adalah bagian dari laporan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber-sumber tertulis dan wawancara mendalam. Analisisnya mengungkapkan aktivitas aktor non-negara yang semakin intens dengan implikasinya yang mengancam stabilitas negara dan hubungannya dengan negara lain.

Kata Kunci: migrasi, stabilitas kawasan, terorisme, pekerja migran, Asia-Pasifik

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dunia tidak pernah melihat begitu tingginya frekuensinya lalu-lintas dan migrasi manusia yang berlangsung dewasa ini di kawasan Asia Pasifik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Globalisasi, kemajuan ekonomi dan teknologi, serta kian terbukanya kawasan oleh dorongan, jika tidak mau mengatakannya sebagai tekanan, perdagangan bebas dan integrasi ekonomi lebih mendalam telah membuat interaksi manusia di kawasan semakin intensif berlangsung. Interaksi yang terjadi pun tidak lagi bersifat biasa saja, seperti interaksi antar-warga pada umumnya, tidak sengaja dan sebentar, namun juga direncanakan dan diorganisasi, atau memiliki tujuan, dan berlangsung untuk jangka panjang dan bahkan

permanen. Karena itulah, dikenal kemudian istilah “imigran legal” dan “imigran gelap atau ilegal” untuk menjelaskan adanya aktivitas “penyelundupan manusia,” selain *human trafficking in persons*, dan perdagangan orang untuk menjelaskan berbagai kasus serupa.

Masalah penyelundupan manusia semakin sering kasusnya terjadi dibandingkan dengan ketika penulis mengkaji masalah ini pada tahun 2009.¹ Dalam kajian studi hubungan internasional, sebenarnya, masalah ini sudah mulai memperoleh perhatian serius di penghujung tahun 1980-an. Saat itu, perspektif hubungan internasional mulai secara luas membicarakan isu ancaman keamanan non-tradisional sebagai ancaman yang sama seriusnya dengan masalah yang datang dari faktor militer, yang diidentifikasi sebagai ancaman keamanan

* Penulis adalah *Research Professor* untuk Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi (P3DI) DPRRI; alamat email: pptogin@yahoo.com.

¹ Lihat, Poltak Partogi Nainggolan (ed.), 2009. *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: P3DI.

tradisional.² Jadi, selama 2 dasawarsa lebih, sejak studi ini mulai menilainya sebagai salah satu faktor ancaman keamanan internasional, masalah lalu-lintas dan interaksi manusia secara global telah berkembang lebih kompleks, dengan segala implikasinya. Sehingga, ia tidak mungkin disebut lagi sebagai “isu-isu lunak,” yang kurang penting dari “isu-isu keras,” seperti masalah peningkatan anggaran belanja militer, perlombaan senjata, pengembangan senjata nuklir, perang antar-negara, dan sebagainya.

Masalah ini tidak lagi sekadar hal yang dapat turut berkontribusi pada munculnya kejahatan transnasional. Namun juga, ia telah diidentifikasi sebagai hal yang dapat mengancam nilai inti dari keamanan, yakni kedaulatan nasional, sebagai sebuah persoalan yang sama seriusnya dengan eksistensi sebuah bangsa dan negara.³ Masalah inipun semakin memperlihatkan implikasinya, semakin kompleks kaitannya dengan ancaman lain, misalnya, degradasi lingkungan yang menyebabkan kelangkaan pangan,⁴ berkembangnya radikalisme agama, sektarianisme dan lain-lain, yang kian menggerogoti eksistensi sebuah bangsa dan negara.

Masalah migrasi manusia bukan kasus baru yang mencemaskan negara-negara Eropa Barat dan AS yang aman dan damai, serta makmur. Sedangkan bagi negara-negara di Asia Pasifik, baik yang menjadi sumber, lintasan (transit), maupun daerah tujuan para imigran gelap, muncul sebagai ancaman baru terhadap stabilitas dan masa depan negaranya. Wilayah Asia Pasifik, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Australia belakangan menjadi rentan terhadap masuknya imigran gelap, karena posisi geografis, perkembangan ekonomi, kondisi politik, hukum, dan sosial masyarakatnya. Di samping itu, perkembangan politik di kawasan

sekitar, yakni Timur-Tengah dan Asia Selatan, yang kian mengalami ketidakstabilan politik, membuat semakin banyak orang yang mengalir ke Asia Pasifik, untuk sekadar mencari tempat persinggahan sementara ataupun untuk tujuan akhir dan tempat tinggal selamanya para imigran.

B. Perumusan Masalah

Masalahnya sekarang adalah bagaimana posisi geografis, kondisi politik, hukum, ekonomi dan sosial masyarakatnya itu dapat menjelaskan kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah transit dan tujuan akhir kasus-kasus penyelundupan manusia? Lalu, bagaimana pula migrasi manusia yang semakin meluas di kawasan ini berdampak terhadap stabilitas dan hubungan antar-negara dewasa ini, terutama antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Australia, negeri yang menjadi impian para imigran gelap dan pelaku penyelundupan manusia dari berbagai negara? Bagaimana pula kaitannya dengan ketidakstabilan keamanan di wilayah asal dan transit para imigran gelap?

C. Metode Penelitian

Analisis ini merupakan bagian dari penelitian awal terhadap kegiatan migrasi manusia di Asia Pasifik, terutama di beberapa negara di atas, dan implikasinya terhadap stabilitas dan hubungan antar-negara di sana. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan data diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan wawancara mendalam dari *field research* yang pernah dilakukan di pintu-pintu masuk imigran dari wilayah perairan, yaitu di Provinsi-provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dalam rentang waktu 2009-2014. Adapun analisis implikasi terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Australia dilakukan secara khusus di sini, karena tingginya arus imigran yang berupaya memasuki kedua negara itu. Di samping itu, analisis ini diperlukan karena implikasinya yang sering mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara bertetangga di kawasan Asia-Pasifik.

² Lihat, antara lain, Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies In the Post Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf, 1989.

³ Lihat, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 125.

⁴ Jill Steans and Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes*. Essex: Pearson, Education, 2001, h. 189.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Migrasi Manusia Lintas Kawasan

Meningkatnya radikalisme di Timur-Tengah dan Afrika tidak hanya dapat dilihat hubungannya dengan situasi di kawasan lain di Asia Pasifik, tetapi juga berdampak kuat terhadap kawasan yang disebut terakhir itu. Menguat dan menyebarnya aksi-aksi kekerasan di Timur-Tengah dan Afrika tidak hanya berimplikasi ke Eropa yang sejahtera, aman, dan stabil, tetapi juga kawasan ini, Asia Pasifik. Ini diindikasikan tidak hanya dengan mengalirnya pengungsi, pencari suaka, dan imigran gelap, namun juga berkembangnya ideologi dan aksi-aksi radikalisme mereka.

Situasi dunia yang ditandai banyak konflik bersenjata di dalam negeri akibat perebutan kekuasaan, absennya pembangunan serta tidak hadirnya, dan kegagalan demokrasi (*development and democracy malfunction*) di berbagai negara di belahan dunia telah meningkatkan secara drastis jumlah pengungsi dan pencari suaka yang mengalir ke kawasan dan negeri lain. Memburuknya situasi di lokasi pengungsian lokal telah mendorong mengalirnya pengungsi yang lebih banyak ke luar negaranya dan kawasan sekitar. Tidak tersedianya akses atas bantuan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan adalah beberapa penyebab utamanya.

Jumlah mereka yang terusir dari negeri asalnya dan menjadi pengungsi terus meningkat. Di dalam negeri Suriah saja terdapat sedikitnya 6,5 juta pengungsi, Nigeria dengan 3,3 juta, Sudan dengan 2,42 juta, Irak di atas 2,1 juta, dan Somalia dengan sedikitnya 1,1 juta pengungsi.⁵ Belum lagi dengan mereka yang harus mengungsi karena mengalami kejahatan kemanusiaan, seperti yang dialami penduduk minoritas Rohingya. Sumber lembaga pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan, sampai akhir tahun 2013, di seluruh dunia terdapat lebih dari 51,2 juta pengungsi dan pencari suaka --jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II. Sebanyak 16,7 juta dari total jumlah itu adalah pengungsi

lintas negara, sedangkan 1,2 juta adalah pencari suaka.⁶

Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah manusia yang melakukan kegiatan migrasi melonjak lebih dari 6 juta orang. Perang saudara di Suriah turut menjadi penyumbang utama angka lonjakan jumlah pengungsi itu. Di antara mereka termasuk yang kemudian melakukan kegiatan sebagai imigran gelap, yang mengalir ke kawasan Asia Pasifik, mencari negara transit dan tujuan untuk memulai kehidupan baru.

Eskalasi kekerasan di kawasan Timur-Tengah berdampak pada mengalirnya pengungsi ke luar wilayah negara mereka. Sejak konflik pecah Maret 2011 di Suriah, sebanyak 2,5 juta orang telah melarikan diri dari negeri tersebut. Sedangkan konflik internal dan sektarian yang meningkat di Afghanistan, Suriah, Somalia, Sudan Selatan, dan Afrika Tengah, serta meningkatnya aktifitas kelompok-kelompok konservatif atau radikal di Mali, Libya, Yaman, Nigeria, Pakistan dan Irak telah mendorong peningkatan jumlah pengungsi, pencari suaka dan imigran gelap secara drastis, ke seluruh dunia, khususnya Asia Pasifik. Jika dilihat lebih mendalam, separuh dari populasi pengungsi dunia berasal dari Afghanistan, Suriah, dan Somalia.

Kecenderungan juga memperlihatkan, saat ini semakin banyak pencari suaka dari 40 negara yang untuk sementara waktu mencari perlindungan di Indonesia, sambil menunggu solusi dari UNHCR.⁷ Terkait permintaan suaka secara resmi (legal), seperti laporan UNHCR Perwakilan Indonesia, juga tampak perkembangan yang serupa, atau terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun UNHCR perwakilan Indonesia saat ini tengah menangani 10.623 orang, dengan rincian 7.218 sebagai pencari suaka dan 3.405 sebagai pengungsi (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Jumlah Pencari Suaka dan Pengungsi

Status	Jiwa
Pencari Suaka	7.218
Pengungsi	3.405
Jumlah	10.623

Sumber: Laporan UNHCR, 2014

⁵ Sita Planasari Aquadini, "Angka Pengungsi Internal Tembus Rekor Tertinggi," *Koran Tempo*, 17 Mei 2014, h. 10.

⁶ "Jumlah Pengungsi Melonjak," *Kompas*, 21 Juni 2014, h. 10.

⁷ *Ibid.*

Jika dilihat dari negara asal, sebanyak 44 persen pencari suaka berasal dari Afghanistan, dan 14 persen dari Myanmar. Sementara, dari kalangan pengungsi, sebanyak 36 persen berasal dari Afghanistan dan 23 persen dari Iran (Lihat Tabel 2).

Tabel 2: Asal Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Persentase

Negara Asal	Pengungsi	Pencari suaka
Afghanistan	36%	44%
Iran	23%	NA
Myanmar	NA	14%

Sumber: Laporan UNHCR, 2014

Jika dilihat perbandingannya, pada tahun 2008, pencari suaka ke Indonesia baru berjumlah 385 orang, dan setiap tahun setelah itu mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 2009 jumlah pencari suaka di Indonesia menjadi 3.230 orang, tahun 2011 menjadi 4.052 orang, dan tahun 2013 melonjak menjadi 8.332 orang (lihat Tabel 3).⁸

Tabel 3: Jumlah Pencari Suaka ke Indonesia

Tahun	Jumlah
2008	385
2009	3.230
2011	4.052
2013	8.332

Sumber: Laporan UNHCR, 2014

Selanjutnya, semakin terbukanya kawasan dan intensnya hubungan antar-manusia di kawasan menyebabkan kian rawannya muncul persoalan di antara para aktor non-negara akibat benturan perbedaan etnik, ras, agama, dan ideologi politik.⁹ Sebagai konsekuensinya, mengalirlah pengungsi dan begitu pula muncul permintaan suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia, atau apa yang dikategorikan sebagai *illegal trafficking in persons*, dan yang lebih dikuatirkan lagi, ancaman terorisme, yang menyertainya. Perkembangan memperlihatkan munculnya negara-negara di kawasan ini sebagai jalur transit pengungsi, pencari suaka, dan pelaku terorisme. Adapun

rute-rute yang mereka lalui untuk kegiatan lintas batas legal dan ilegal adalah dari Afrika ke Timur-Tengah (Arab Saudi, Qatar, Mesir, Pakistan, dan lain-lain), dan dari Suriah, Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan, dan Myanmar menuju Thailand, Malaysia, untuk kemudian ke Indonesia.

Asia Tenggara menjadi sasaran utama para pelintas batas legal dan ilegal. Di Indonesia, mereka bisa masuk ke Pulau Sumatera, dan masuk lebih dalam lagi ke wilayah-wilayah Lampung, untuk masuk ke dan tinggal sementara dan jangka lama di Pulau Jawa, lewat Banten. Kemudian, mereka dapat melanjutkan perjalanannya ke Pulau Lombok, Timor, dan Rote, untuk kemudian masuk ke Australia, jika negeri itu memang tujuan akhirnya. Tetapi, jika Indonesia sebagai tujuan akhir, mereka dapat tinggal di Cianjur, Banten, Tangerang dan Jakarta, untuk menetap di sekitar wilayah Tanah Abang, wilayah-wilayah yang kondusif dengan latar belakang agama, etnik, dan tujuan mereka.

Lalu lintas manusia yang ilegal dan meningkat pesat belakangan, di antara negara yang bertetangga di kawasan Asia Pasifik, terutama di wilayah perbatasan darat dan laut yang panjang sekali dan sulit diawasi oleh pos-pos imigrasi dan bea-cukai serta aparat keamanan, berpengaruh terhadap meningkatnya praktek-praktek kejahatan transnasional. Di perbatasan Indonesia-Malaysia di sekitar Tebedu, Serawak, misalnya, telah menjadi rawan atas aktifitas para penyelundupan barang dan manusia ke dan dari Malaysia, yang akan melewati Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia. Baik Tebedu maupun Entikong memiliki Pelabuhan Lintas Batas (PLB) menuju Malaysia, dan sebaliknya, ke Indonesia untuk angkutan penumpang dan barang. Praktik suap sistemik setiap hari maupun bulanan menjadi bagian dari *modus operandi* dan aktifitas para pelintas batas ilegal ini.¹⁰ Mentalitas aparat yang mudah disuap di wilayah perbatasan kedua negara, terutama Indonesia, merupakan penyebab kegagalan dalam penegakan hukum di lapangan.

⁸ "Permintaan Suaka ke Indonesia Terus Meningkat," *Kompas*, 12 Mei 2014, h. 8.

⁹ Lihat, "Turis Tiongkok Diculik di Sabah," *Kompas*, 4 April 2014, h. 9.

¹⁰ Lihat, laporan penelitian penulis sebelumnya dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed.), *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: P3DI, 2009.

Isu perdagangan manusia rawan terjadi belakangan dan sering berulang kasusnya muncul, karena tingginya penawaran dari daerah asal. Banyaknya wilayah dengan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang tinggi, serta rendahnya latarbelakang pendidikan penduduknya, di satu pihak, dan tingginya permintaan tenaga kerja murah di daerah tujuan, di pihak lain, menjadi pangkal persoalan banyaknya kasus perdagangan manusia yang muncul. Dalam *modus operandi* para pelaku perdagangan manusia asal Indonesia, ada yang menggunakan identitas palsu sebagai pencari kerja asal Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia –TKI) dan ada yang menggunakan paspor pelancong, serta ada pula yang tidak dilengkapi dokumen sama sekali.

Proses yang tidak mengikuti prosedur hukum yang sebenarnya, terutama dalam hal keberangkatan, menyebabkan mudah dan maraknya kasus perdagangan manusia berlangsung. Kasus semacam ini banyak terjadi di kalangan para TKI ke Malaysia, sebagai kasus yang terbesar, serta ke negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, melalui Uni Emirat Arab. Peran aktor non-negara berskala internasional, yakni para calo, baik di negara asal dan tujuan, untuk mencari keuntungan ekonomi, telah meningkatkan terjadinya kasus-kasus ini. Sebaliknya, sikap masyarakat Indonesia yang lebih toleran kepada para pendatang dari mancanegara, terutama asal Timur-Tengah, Afrika, dan Asia Selatan yang berlatarbelakang Islam, serta lembeknya sikap aparat Indonesia terhadap pelanggaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum di hampir seluruh wilayah Indonesia, telah menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan sekaligus tujuan alternatif.

Terkait kecenderungan meningkatnya *illegal trafficking in persons* dari mancanegara, terutama negara-negara Timur-Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, ke Indonesia, wilayah Jakarta dan Jawa Barat, menjadi tempat transit untuk pengurusan paspor dan visa, dan juga untuk mencari *safe haven* sementara, karena penduduknya yang berlatar belakang sama dengan para pelaku kegiatan lintas-batas ilegal dan sangat *welcome* dan ramah terhadap

kedatangan dan kehadiran mereka.¹¹ Sementara Kupang menjadi *pintu exit* terakhir sebelum menuju ke negara tujuan akhir, Australia. Untuk kasus pekerja migran ilegal yang mengalir dari Indonesia, negara Uni Emirat Arab telah dijadikan wilayah alternatif keberangkatan menuju Arab Saudi, sebagai tujuan akhir TKI ilegal, atau target akhir perdagangan orang asal Indonesia.¹²

Semakin derasny arus imigran gelap dari mancanegara disebabkan terutama oleh posisi dan letak geografis Indonesia yang sangat strategis, menarik, dan mudah diakses. Sehingga, Indonesia juga menjadi alternatif sebagai daerah tujuan atau tempat tinggal baru, selain sekedar sebagai wilayah transit, sebelum mereka menuju tujuan akhir ke Australia. Semakin sulitnya akses masuk ke Eropa melalui wilayah darat, udara dan laut, baik yang legal maupun tidak legal dewasa ini, selain tingginya persaingan di antara mereka yang ingin bermigrasi ke sana, membuat para imigran gelap menjadikan Asia Pasifik dan Asia Pasifik sebagai *safe haven*, dan Indonesia dan Australia, terutama, sebagai negeri transit dan tujuan. Ini artinya mereka harus berlayar melalui Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, di samping menggunakan moda transportasi lain melalui udara dan darat yang beragam dan lebih panjang, serta dapat dikombinasikan, walaupun lebih lama waktunya. *Modus operandi* bisa berbeda, dengan masuk secara resmi sampai Jakarta atau provinsi NTT, lalu kemudian menghilangkan atau membakar paspor mereka. Dalam kasus lain, bisa transit di Kuala Lumpur, sebelum tiba di wilayah perairan Indonesia, dengan penghilangan paspor lebih dulu secara sengaja di wilayah transit tersebut.

B. Migrasi Manusia dan Instabilitas Indonesia

Adanya kaitan antara kegiatan lalu-lintas yang ilegal dan interaksi manusia di kawasan dengan kegiatan jejaring terorisme internasional dan lokal telah diketahui sejak

¹¹ Lihat "Warga Mentawai Diduga Korban *Trafficking*," *Republika*, 2 Mei 2014, h. 7.

¹² Nainggolan, 2009, *loc.cit.*

awal tahun 2000-an, pasca-serangan atas WTC tahun 2001. Dalam kasus di Indonesia, telah ditemukan fakta bahwa dalam konflik sektarian yang terjadi di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Maluku, terutama Ambon, terdapat keterlibatan kelompok-kelompok radikal asal Indonesia dan juga yang memiliki hubungan dengan jejaring teroris internasional di kawasan Asia Pasifik dan luar kawasan (Timur-Tengah). Lebih jelas lagi, terdapat kaitan instabilitas Indonesia akibat konflik sektarian di Poso dan Ambon itu dengan aktifitas *illegal trafficking* yang dilakukan para anggota jaringan Al-Qaeda asal Indonesia. Sebagai bagian dari kegiatan terorismenya, mereka telah menjadikan Indonesia baik sebagai negara transit maupun tujuan. Melalui kegiatan *illegal trafficking* ini, mereka berupaya menghindari diri dari serangan eliminasi Barat dan koalisi internasionalnya di Timur-Tengah dan Asia Pasifik, yang berkomitmen dalam perang total melawan terorisme internasional.

Aktifitas dan modus yang sama telah digunakan pula oleh anggota sel jejaring Al-Qaeda dalam konflik-konflik berskala rendah di Filipina dan serangan teroris internasional di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Pasifik, terutama di dalam dua kali aksi pemboman di Bali (2002 dan 2005). Mereka memanfaatkan kegiatan *illegal trafficking* untuk menjalankan aksi-aksi terorisme lokal dan internasional secara langsung, ataupun untuk membantu rekan-rekan mereka dalam mengkonsolidasikan diri dan memperkuat jaringan kerja sama dan melancarkan aksi-aksi alternatif selanjutnya.¹³ Secara realistis, keterlibatan jaringan teroris internasional ini membuat konflik lokal semakin tinggi kompleksitasnya dan menyulitkan pula upaya mencari resolusi konflik.

Meningkatnya aktifitas kelompok konservatif radikal dan keterlibatan mereka dalam perang sektarian melawan rejim-rejim lokal dan transisional di Timur-Tengah, terutama di Suriah, Turki, Jordania, Mesir,

Palestina, Israel, Mesir, Lebanon, Irak dan Afghanistan, telah membawa dampak tidak hanya pada negara sekitar, tetapi juga pada keamanan negara di kawasan lain. Globalisasi, konektifitas dan mudahnya transportasi lintas-negara karena didukung teknologi dan pembangunan infrastruktur telah memudahkan lalu-lintas manusia global dan interaksi di antara mereka. Pada Perang Afghanistan-Uni Soviet, keterlibatan para aktor perang dari banyak negara, tidak hanya tentara dari AS dan Uni Soviet, namun juga kombatan sipil dari negara-negara luar kawasan yang terpanggil karena misi agama untuk memenuhi seruan Jihad.

Menyebarnya ideologi kaum konservatif dan meningkatnya aktifitas kelompok-kelompok radikal secara global di kawasan Timur-Tengah, Afrika, dan Asia Selatan dewasa ini telah menciptakan ancaman yang serius bagi stabilitas dan perdamaian global.¹⁵ Hal ini diperparah dengan kemajuan drastis kampanye milisi Negara Islam Irak dan Suriah Raya (*Islamic State in Iraq and Syria* –ISIS, yang bisa juga *Islamic State in Iraq and al-Sham*), dan juga Levant (*Islamic State in Iraq and the Levant* --ISIL), belakangan ini, yang telah mengklaim wilayah mereka dari Selatan Turki, melewati Suriah ke Mesir, termasuk Lebanon, Israel, Palestina, dan Jordania. Mereka berupaya mendirikan negara Islam di seluruh wilayah itu dan hendak melanjutkan kekhalifahan Islam seperti di masa lalu.

Secara realistis, dua dasawarsa pasca-Perang Afghanistan melawan pendudukan Uni Soviet, baik konflik antar-negara maupun konflik internal di Timur-Tengah, telah memperlihatkan keterlibatan para aktor non-negara lebih banyak lagi, terutama dari negara dengan mayoritas Islam, seperti Indonesia. Naiknya peran militan Islam atau kelompok radikal, yang ingin membentuk ISIS, dalam konflik internal di Suriah telah memancing lebih banyak *Jihadists* untuk datang berjihad atau bertempur di sana untuk melawan rejim Assad. Melalui media sosial, seperti *website*

¹³ Lihat, "Poso Jadi Ajang Laga Tereoris Internasional: Jaringan Al-Qaeda Terlibat," *Media Indonesia*, 13 Desember 2001: 24 dan Tom Cawley, "Al-Qaeda Runs Camps On Island In Indonesia," *Financial Times*, 13 December 2001, h.8.

¹⁴ Lihat, "Pascal S Bin Saju," Radikalisme Mengancam Umat Manusia," *Kompas*, 22 Juni 2014, h. 5.

di internet, berbagai kelompok jihad di Indonesia mereka telah menjanjikan dukungan pengiriman *jihadists* ke ISIS dan menyerukan pengumpulan dan pemberian bantuan keuangan untuk mendukung lebih lanjut aktifitas jihad. Bahkan, pada 8 Pebruari 2014, di Universitas Negeri Islam (UIN), ideolog radikalnya, Halawi Makmum, telah menggalang pengumpulan dana untuk mendukung ISIS, yang berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp. 41,99 juta (3,553 dolar AS).¹⁵

Dukungan ke ISIS kian meningkat secara signifikan setelah kemenangan ISIS berturut-turut di wilayah-wilayah penting di Suriah dan Irak, seperti di Tikrit dan Mosul, yang mengancam Pemerintah Maliki dan kaum Syiah di Irak. Dari Indonesia, ISIS memperoleh dukungan dari mereka yang telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris, yaitu Jaringan Mujahidin Indonesia Timur, yang dipimpin oleh Santoso, dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, dan Jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Aman Abdurrahman, seorang kyai radikal yang tengah ditahan 9 tahun di penjara karena membantu sebuah kamp pelatihan paramiliter Ba'asyir di Aceh, telah bersumpah, melalui internet, untuk memberikan dukungannya pada pimpinan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, bulan lalu.¹⁶

Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah, sel teror domestik lainnya di Indonesia tidak mendukung ISIS, tetapi mendukung rivalnya sesama kelompok jihad, yakni Front Al-Nusra. Sebagaimana diungkapkan ahli teroris Indonesia, Noor Huda Ismail, sejumlah *jihadists* asal Indonesia telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan ISIS, di Suriah dan Irak.¹⁷ Beberapa dinilai telah terpengaruh oleh ideologi ekstrim, ajaran agama yang fundamentalis, yang dikampanyekan, sedangkan yang lainnya karena kebutuhan memperoleh uang. Mereka yang direkrut mengatakan memperoleh gaji dan akomodasi yang disediakan ISIS. Mengingat

para *jihadists* dari Indonesia akan mudah masuk ke Suriah lewat Turki, sehingga tidak diragukan lebih banyak kaum militan akan bergabung dengan ISIS di masa depan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), paling sedikit 50 orang asal Indonesia, di antaranya mantan narapidana terorisme yang sudah bebas, telah bertempur di Suriah melawan rejim Bashar al-Assad. Wildan Mukhallad, asal Indonesia, yang berumur 19 tahun, telah ditemukan tewas setelah melakukan serangan bom bunuh diri di Irak dan sebelumnya bertempur di Aleppo, Suriah.¹⁸ Dikuatirkan, ketika kembali ke Indonesia, para militan dan *jihadists* Indonesia itu akan menjadi ancaman potensial atas keamanan nasional. Mereka membawa ideologi radikal, pengalaman tempur dan pelatihan militer, keahlian menggunakan senjata, dan keberadaan jaringan internasional mereka, yang tidak atau belum dimiliki sel-sel dan jaringan teroris lokal. Selama ini, 16 orang telah kembali dari misi jihad mereka di Suriah, dengan tugas baru merekrut pendukung baru untuk ISIS.¹⁹

Diberitakan, ISIS telah menyumpah setia sekitar 2 juta warga Indonesia, dengan latarbelakang pendidikan yang beragam, terutama mahasiswa, sebagai pendukung kekhalifahan Islam yang diperjuangkannya. Mereka telah direkrut dari wilayah-wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Medan, Lampung, Riau, Madura, dan sebagian Aceh oleh 16 orang dari berbagai organisasi Islam yang telah bergabung dengan ISIS.²⁰ Di Jawa Timur, sekitar 500 orang yang menamakan diri Kelompok Ansharul Khilafah telah mendeklarasikan dukungan mereka pada ISIS.²¹ Mereka yang telah direkrut itu mempunyai 2 pilihan, yaitu hijrah ke Suriah untuk berjihad atau mengubah Indonesia menjadi negara kekhalifahan. Sehingga, ISIS menjadi ancaman yang rawan tidak hanya buat Indonesia, tetapi

¹⁵ Sydney Jones dalam Yuliasri Perdani, "With Iraq gains, ISIS finds traction with Indonesian hard-liners," *The Jakarta Post*, June 14, 2014, h. 4.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Purwanto, "ISIS Dduga Baiat Dua Juta Warga Indonesia," *Koran Tempo*, 3 Agustus 2014, h.3.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Purwanto, "Komunitas Pendukung ISIS Muncul di Daerah," *Koran Tempo*, 1 Agustus 2014, h.4.

juga kawasan Asia Pasifik yang semakin rawan menjadi basis perebutan wilayah pengaruh dengan Al-Qaeda, yang sama-sama mengusung fundamentalisme dan radikalisme, dengan aksi-aksi terorisme mereka yang meningkat di Irak belakangan. Karena itu, Pemerintah Indonesia, terutama pihak yang berwenang dan aparat keamanan, harus dapat mengantisipasi dampaknya. Sebab, implikasinya bisa lebih besar dan berbahaya bagi keamanan dalam negeri Indonesia dibandingkan dengan di tahun 1990-an ketika para *jihadists* Indonesia kembali dari Afghanistan, yang sesudahnya telah menciptakan aktifitas dan gelombang baru serangan terorisme.²²

Jihadists dari Indonesia telah terlibat dalam perang saudara di Suriah sejak perang berkecamuk pada 26 Januari 2011. Mereka termasuk dari 11.000 orang dari 74 negara yang bergabung dalam pejuang perlawanan Suriah melawan rejim Bashar al-Assad. Mereka menilai negeri Syria al-Sham adalah tempat suci untuk berjihad, demi memerangi rejimnya yang dinilai jahat. Seruan jihad ke Suriah pada saat ini jauh lebih keras dari jihad ke Afghanistan melawan Uni Soviet dan rejim bonekanya di dekade 1980-1990. Di masa lalu, para *jihadists* asal Indonesia veteran Perang Afghanistan telah menjadi perencana dan pelaku Bom Bali pada 2002, yang kemudian diulangi lagi pada tahun 2005.²³

Seruan untuk jihad di Suriah telah disuarakan secara terbuka di berbagai lingkungan komunitas Islam tertentu dalam berbagai kegiatan. Kelompok-kelompok jihad telah berupaya merekrut sukarelawan dari universitas, khususnya para mahasiswa garis keras dari keluarga-keluarga kaya. BNPT telah mencatat terdapat lebih dari 50 orang pejuang dari Indonesia di Suriah yang tergabung dalam jaringan teroris Al-Qaeda. Agenda mereka beragam, terutama untuk membantu oposisi Suriah menjatuhkan rejim Assad dan kelompok Syiah pendukungnya. Dalam pandangan

mereka, peperangan yang berlangsung di sana adalah antara kaum Sunni melawan Syiah.

Selain itu, terdapat agenda sampingan para *jihadists*, yakni bertemu dengan para pejuang asal berbagai negara di dunia untuk membangun jaringan jihad global. Jihad di Suriah itu sendiri dengan berdirinya negara Islam di Suriah dinilai akan meningkatkan martabat dan eksistensi Islam di dunia internasional. Namun, dampak lebih luasnya jauh lebih menguatirkan, karena para veteran perang Suriah ini dapat menyebarluaskan paham dan aksi radikalisme, kekerasan atas nama agama, dan aksi-aksi terorisme di dalam negeri, terutama Indonesia yang dewasa ini tengah dilanda kerawanan yang datang dari ancaman aksi-kasi terorisme bernuasa agama. Pengalaman perang, ideologi radikal, dan singgungan mereka dengan berbagai kelompok dan anggota jaringan jihad mancanegara (global) secara cepat atau lambat dapat mempengaruhi wajah Islam di Indonesia, walaupun selama ini mayoritas Muslim Indonesia, yang direpresentasikan dengan 2 kelompok besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dikenal sebagai moderat.²⁴ Sebab, sejak bertumbuhnya sekolah-sekolah kelompok Islam radikal di tahun 1980 dan 1990 dan politik rezim Orde Baru Soeharto yang mendekati mereka, terjadi pertumbuhan yang signifikan ideologi dan aktifitas gerakan radikaisme di Indonesia. Sehingga, kehadiran para veteran perang Suriah nanti, jika mereka diperbolehkan mengajar di sekolah-sekolah tradisional berwawasan radikal yang ada, akan memperkuat pengaruh ideologi dan gerakan radikalisme Islam di tanah air. Ini belajar dari pengalaman veteran perang Afghanistan dan Filipina Selatan yang kembali ke tanah air dan berjihad lagi dalam konflik sektarian di Poso dan Maluku.

Dampak yang ditimbulkan dari kembalinya para veteran perang Suriah diperkirakan akan jauh lebih buruk karena mereka telah dilatih sebelumnya oleh berbagai kelompok yang terhubung dengan jaringan Al-Qaeda, Jabhat al-Nushra, dan Pejuang Negara Islam Irak

²² Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Jakarta, *ibid*.

²³ Tia Mariatul Kibtia, "Jihadist in Syria and their implication for Southeast Asia," *The Jakarta Post*, May 23, 2014, h.7.

²⁴ *Ibid*.

(The Islamic State of Iraq, Suriah, and the Levant –ISIS/ISIL) dan di utara dan timur Suriah. Mereka telah dilatih menggunakan dan membuat berbagai jenis bahan peledak (*improvised explosive devices* –IED), membuat bom mobil, dan melakukan aksi bom bunuh diri. Mereka akan kembali ke Indonesia dengan keahlian, pengalaman, kontak, kredibilitas dan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran jihad baru. Perang Suriah dan kembalinya para veteran jihad asal Indonesia akan membawa tantangan dan masalah baru, karena mereka memperoleh pemahaman ideologi jihad global dan pengalaman berjihad langsung.

Kelompok orang yang baru direkrut tertarik bergabung untuk memperjuangkan pendirian negara Islam dan berjihad ke Suriah dan Irak, setelah beredar luasnya propaganda “Ayo Bergabung” di *YouTube*, yang dilakukan oleh Abu Muhammad al-Indonesi. Terakhir terungkap, Abu Muhammad al-Indonesi adalah buronan teroris yang dicari, yang selama ini diidentifikasi dengan inisial “B.” Ia dekat hubungannya dengan Santoso, alias Abu Wardah, pelaku terorisme berbahaya, pengikut Al-Qaeda untuk wilayah Asia Pasifik, yang jaringannya banyak beraksi di Indonesia Timur.²⁵

C. Migrasi Manusia dan Hubungan Antar-Negara

1. Kasus Indonesia-Malaysia

Masalah migrasi manusia sejak awal bukan merupakan persoalan sebuah negara saja. Karena hakekat kegiatannya berupa aktifitas perjalanan ke negara lain, ia selalu saja melibatkan kepentingan negara lain, minimal 2 negara. Sehingga logis, implikasinya pun tidak dirasakan hanya oleh satu negara, tetapi bisa beberapa negara di kawasan, dan bahkan lintas kawasan. Implikasinya kian dirasakan di beberapa kawasan, jika intensitas kegiatannya semakin meningkat, dan para pelakunya jumlahnya meningkat drastis dan bersifat masif. Salah satunya adalah persoalan pekerja migran, yang porsi peran pekerja domestik di kawasan begitu tinggi.

Secara realistis, hubungan antara negara di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh masalah tenaga kerja migran. Pada pertengahan kedua dasawarsa 1960, pekerja migran dari Indonesia diundang datang ke Malaysia juga dimotivasi tujuan politik, untuk memberi dukungan pada ras Melayu dalam berkompetisi dengan ras China. Pada waktu SDM Malaysia, terutama ras Melayu, belum sebaik sekarang, sehingga posisinya masih terpinggirkan dalam politik domestik. Setelah itu, karena pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang dicapainya, Malaysia dan Indonesia menjadi sasaran para pekerja migran dari negara sekitarnya, terutama yang terbelakang, seperti Bangladesh dan Myanmar. Mereka mencari pekerjaan yang banyak tersedia di sektor perkebunan, konstruksi, dan pabrik dengan upah murah, yang sudah ditinggalkan orang Malaysia. Sekitar 2 juta pekerja migran ilegal bekerja di Malaysia, dan yang terbanyak justru pekerja migran dari Indonesia.²⁶ Ironisnya, pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal, dan imigran gelap justru datang dari India, Bangladesh, Myanmar, RRC, negara-negara Eropa Timur pecahan Uni Soviet, serta Timur-Tengah, Afrika yang dilanda konflik, datang ke Indonesia, di saat pekerja migran Indonesia banyak yang mencari kerja di mancanegara, terutama Malaysia, negara tetangga terdekat.

Mereka berusaha masuk secara gelap (ilegal), dan juga berusaha kembali ke negeri asalnya secara ilegal, karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, selain takut ketangkap dan ditahan, serta tidak bisa lagi kembali bekerja di Malaysia. Mereka masuk dalam jumlah besar, ada yang dengan dengan anggota keluarga, menggunakan kapal-kapal kecil yang melebihi kapasitas. Insiden sering terjadi, karena kapal bocor dan terbalik akibat kelebihan muatan dan ombak laut yang besar. Mereka sering berlayar pada malam hari, dalam gelap gulita, demi menghindari patroli laut aparat keamanan, dengan menggunakan moda transportasi di darat yang beragam. Mereka

²⁵ “Aktor Video ISIS Buron Terorisme,” *Media Indonesia*, 5 Agustus 2014, h.2.

²⁶ M. Jegathesan, “35 missing in boat accidents off Malaysia,” *The Jakarta Post*, June 20, 2014, h.12.

menggunakan jalan-jalan tikus yang tersedia banyak di sepanjang perbatasan darat dan laut Indonesia-Malaysia yang panjang dan sulit diawasi, karena terbatasnya pos pengawasan yang ada. Kapal-kapal yang biasa digunakan para pekerja migran gelap itu pada umumnya tidak layak untuk menyeberangi Selat Malaka. Suap dan mentalitas aparat yang rendah kadang-kadang turut membantu meloloskan mereka, sehingga mereka bisa masuk dan bekerja secara ilegal di Malaysia. Selama ini, dengan menggunakan jalur-jalur tikus, pekerja migran ilegal mengeluarkan biaya 1.600 ringgit Malaysia, atau Rp5,9 juta per orang,²⁷ untuk bisa bekerja di negeri jiran tersebut.

Dalam kasus TKI ilegal di Malaysia, tahun 2012, petugas imigrasi Malaysia telah membongkar penampungan pekerja sektor domestik, yaitu pembantu rumah tangga asal Indonesia, yang ilegal milik Agensi Pekerjaan Sentosa di Selangor, Malaysia. Hasilnya, sebanyak 93 dari 95 TKI telah dievakuasi. Mereka berasal dari kantong-kantong kemiskinan, terutama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan 26 orang di antaranya berumur di bawah 17 tahun.²⁸ Dalam kasus lain, 29 TKI perempuan telah dipekerjakan sebagai budak seks, sementara sang majikan menahan gaji mereka. Tidak satupun dari para TKI itu yang mempunyai surat (dokumen) ijin kerja.²⁹ Awal mulanya mereka dipekerjakan sebagai pembersih rumah dan pembantu rumah tangga secara paruh waktu. Dalam perkembangannya kemudian, majikan mereka melakukan pelecehan seksual. Polisi Selangor Malaysia mencoba membongkar kasus ini setelah menerima laporan pada 31 Mei 2104 lalu dari seorang perempuan Indonesia yang telah dipekerjakan selama 2 tahun dan melahirkan bayi hasil hubungan gelapnya. Polisi Malaysia juga telah berusaha membongkar kasus yang sama di Kota Kemuning dalam waktu yang berdekatan, dan menahan 12 TKI perempuan. Mereka berumur antara 20-30 tahun, yang telah melebihi masa ijin tinggal dan tidak memiliki

dokumen ijin kerja.³⁰ Mereka selama ini tidak dibayar dan juga mengalami pelecehan seksual oleh majikan mereka.

Imigran ilegal datang dari banyak wilayah di Indonesia, baik dari wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia, wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Pada 30 April 2014, misalnya, terdapat 96 orang TKI ilegal asal Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur, telah dideportasi dari Malaysia.³¹ Dalam waktu berdekatan, dilaporkan puluhan remaja, berusia 16-17 tahun, berasal dari kota-kota di Jawa Barat, telah dipaksa menjadi pekerja seks di Malaysia. Mereka diiming-imingi akan dipekerjakan di salon dengan gaji Rp4-8 juta per bulan. KBRI Kuala Lumpur telah menampung 8 remaja perempuan yang melarikan diri dari sindikat perdagangan manusia. Mereka telah membayar biaya pemberangkatan dan akomodasi di Malaysia sebesar Rp50 juta, namun telah dipaksa menjadi pekerja seks di Malaysia. Juga diungkapkan dari kasus itu, masih terdapat 60 orang lagi yang masih berada di bawah cengkeraman sindikat, dan tidak bisa melarikan diri.³²

Keluar masuknya pekerja migran ilegal dari dan ke atau kembali ke wilayah Indonesia telah membawa implikasi juga bagi keamanan lalu-lintas pelayaran. Dalam kasus yang terjadi pada 18 Juni 2014, sebuah kapal kayu yang membawa 97 TKI ilegal telah karam di Selat Malaka, setelah berlayar 2 mil (3,2 kilometer) dari pantai Sungai Air Hitam, Kuala Langat, Malaysia, menuju Aceh. Kapal itu telah mengalami kebocoran dan seharusnya hanya boleh ditumpangi sekitar 50-60 orang, sehingga karam akibat kelebihan muatan. Akibatnya, 12 orang ditemukan tewas tenggelam, dan 27 hilang.³³ Di antara korban

²⁷ "Lima TKI Tewas, 31 Hilang," *Kompas*, 19 Juni 2014, h.15.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Austin Camoens, "Syndicate holding 29 maids as sex slaves in Malaysia," *The Jakarta Post*, June 6, 2014, h.3.

³⁰ *Ibid.*

³¹ "Malaysia Deportasi 96 TKI Ilegal Asal Sampang," *Suara Pembaruan*, 30 April 2014: A 14.

³² "Puluhan Remaja Dipaksa Jadi Pekerja Seks di Malaysia," *Koran Tempo*, 23 April 2014, h. 9. Lihat juga, "Perdagangan Manusia: Polda Buru Penjula Perempuan ke Malaysia," *Kompas*, 24 April 2014, h. 26.

³³ "Kapal TKI Ilegal Karam di Malaysia," *Media Indonesia*, 19 Juni 2014, h. 2; M. Jegathesan, "35 missing in boat accidents off Malaysia," *The Jakarta Post*, June 20, 2014, h. 12, *loc.cit*; "Polisi Malaysia Tahan Dua WNI," *Kompas*, 21 Juni 2014, h.9.

yang selamat terdapat 12 perempuan dan seorang anak.³⁴ Kapal tidak memiliki peralatan keselamatan, termasuk jaket pelampung. Para TKI ilegal itu berlayar dari Kampung Air Hitam di Pulau Carey, Selangor, yang merupakan perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Adapun semua korban selamat ditangkap aparat keamanan Malaysia dengan tuduhan pelanggaran UU Imigrasi, karena kapal dan penumpangnya yang asal Indonesia dianggap ilegal.³⁵ Padahal, KBRI Kuala Lumpur telah memperingatkan agar para TKI yang tidak memiliki dokumen tidak memilih jalan kembali ke tanah air dengan menggunakan jalur tidak resmi. Sebab diketahui, jalur pelayaran itu membahayakan jiwa, tidak aman untuk keselamatan kapal dan juga dari gangguan perompak.

Iming-iming memperoleh pekerjaan di sektor konstruksi, pertanian dan perkebunan yang menjanjikan bayaran atau upah yang tinggi telah menjadi daya tarik bagi banyak pencari kerja atau pengangguran di Indonesia untuk masuk ke Malaysia sebagai imigran gelap, dengan menggunakan para calo dan rute-rute yang berbahaya sekalipun. Insiden tenggelamnya kapal-kapal pengangkut imigran gelap dari Malaysia ke Indonesia, dan sebaliknya, Indonesia ke Malaysia sering terjadi dan menjadi rutin, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat. Para pekerja migran terus berdatangan, karena ada majikan yang mempekerjakan mereka dan juga perilaku aparat yang kompromis dan korup. Para majikan banyak yang ingin mempekerjakan mereka, karena tidak perlu mengurus surat ijin kerja dan dapat membayar mereka di bawah standar, yang sangat murah, serta memperlakukan mereka secara semena-mena, tanpa memberi perlindungan hukum kepada mereka, sehingga menyerupai praktek perbudakan modern. Sementara, para tenaga kerja migran ilegal itu membutuhkan pekerjaan atau uang yang tidak dapat ditawarkan di tanah airnya untuk menghidupi keluarga mereka.

Padahal, ancaman hukumannya di Malaysia, jika diterapkan, cukup berat, bisa 5 tahun penjara dan denda sampai 10.000 ringgit atau 3.000 dolar AS. Dewasa ini, terdapat 4,6 juta tenaga kerja migran legal asal Indonesia bekerja di Malaysia, sedangkan yang ilegal mencapai 2 juta orang.³⁶

Munculnya tuntutan para pekerja domestik di mancanegara telah berdampak terhadap regulasi bilateral yang dibuat. Pada tahun 2011, antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah ditandatangani MOU yang mengizinkan para pekerja domestik untuk memegang atau menyimpan sendiri paspor mereka, dan memberikan adanya 1 hari libur bagi para pekerja domestik di Malaysia. Namun, sayangnya, perbaikan dalam perjanjian kerja ini tidak berdampak terhadap upah atau gaji minimum yang harus mereka terima. Sehingga, upaya perlindungan hukum, atau proteksi terhadap upah atau gaji minimum mereka, masih tidak ada. Ini menimbulkan resiko mereka tetap memperoleh bayaran tidak layak, di bawah standar, dan bahkan, tidak diupah atau digaji sama sekali.

Kehadiran pekerja migran di negara ASEAN sudah berlangsung sejak beberapa dasawarsa, dan terus meningkat belakangan, terutama yang ilegal di Malaysia, yang dipenuhi pekerja migran asal Indonesia (TKI). Hubungan kedua negara mengalami pasang surut dan seringkali terganggu karena isu tenaga kerja migran, yang telah meluas menjadi isu rasial yang merasuki masyarakat dan pemerintahnya. Pemakaian istilah "Indon" yang meluas digunakan di Malaysia, yang diperkenalkan pemerintahnya, untuk menyebut TKI adalah salah satu indikasi dari adanya sentimen rasial yang merendahkan. Hal lain tampak dari tingginya angka penyiksaan yang dialami TKI, karena mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dibandingkan dengan TKI dari Filipina, yang lebih berpendidikan dan sadar akan hak-haknya.

³⁴ Ani Nursalikah, "Lima TKI Ilegal Tewas Tenggelam," *Republika*, 19 Juni 2014, h.7.

³⁵ Lihat, "Kapal Karam di Malaysia, 31 TKI Hilang," *Koran Tempo*, 19 Juni 2014, h.6.

³⁶ Celine Fernandez, "Rescue Teams Seek 27 Lost Off Malaysia Coast," *The Wall Street Journal*, June 20-22, 2014, h. 1 dan 14.

Karena masalah pekerja migran, hubungan Indonesia-Malaysia terusik, antara lain di tahun 2005, setelah ditemukannya kasus penyiksaan terhadap Nirmala Bonet, TKI asal Kupang, NTT. Upaya saling kecam di antara rakyat di kedua negara melalui media massa dan sosial bermunculan, yang berdampak lebih luas dalam bentuk saling melakukan “sweeping,” atau aksi penangkapan sepihak atas warga asal masing-masing negara itu yang diketemukan di jalan-jalan. Terakhir kali, di penghujung tahun 2013, kasus ancaman hukuman mati atas Wilfrida Soik, TKI asal Belu, NTT, muncul. Masalahnya adalah ia ditemukan masih di bawah umur, korban perdagangan anak. Kasus ini menyebabkan Menaker Muhaimin Iskandar harus turun tangan untuk meyakinkan Pemerintah Malaysia atas telah terjadinya kasus perdagangan anak ini dan membebaskan Wilfrida. Isu ini juga telah memotivasi calon presiden Prabowo Subianto, untuk membebaskan Wilfrida, menjelang pemilihan presiden di Indonesia, dengan menemui Menteri Dalam Negeri Malaysia, Ahmad Zahid Hamid. Dukungan 33 negara juga telah membantu membebaskan Wilfrida dari vonis hukuman mati.

Masih terdapat ratusan kasus ancaman hukuman mati yang akan menimpa TKI di Malaysia. Ini artinya, hubungan kedua negara akan terus mengalami pasang surut di masa depan dipengaruhi masalah tenaga kerja migran, baik yang legal maupun ilegal. Hubungan Malaysia-Filipina juga pernah mengalami riak kecil akibat masalah tenaga kerja migran asal Filipina yang juga terancam hukuman mati, namun kemudian dapat dibatalkan. Tidaklah berlebihan dikatakan, masalah *illegal trafficking in persons*, terutama, tenaga kerja migran asal Indonesia (TKI), telah menjadi isu krusial dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dewasa ini. Seperti juga telah diperingatkan media massa di kawasan, sejak lama, ia telah berkontribusi pada munculnya sentimen nasionalisme, ketegangan rasial domestik dan antar-negara, yang rentan menimbulkan perpecahan dalam ASEAN, atau mempengaruhi tingkat daya rekat (*cohesiveness*) dalam ASEAN.³⁷

³⁷ Lihat, “Two RI women trafficked to Malaysia,” *The Jakarta Post*, April 4, 2014, h.12.

Upaya mencari solusi mencegah dan mengurangi praktek-praktek *illegal trafficking in persons* di kawasan ASEAN bisa dikatakan tidak jelas, tegas, dan konsisten. Dalam merespons isu pekerja domestik, Pemerintah Singapura kurang antusias, dan Pemerintah Malaysia, setali tiga uang. Mereka tidak serius, dan juga tampak mendua (ambivalen), atau sering tarik-ulur kebijakan. Kadangkala aparat Malaysia bersikap keras terhadap para pendatang ilegal, yang disebut di sana sebagai “pendatang haram,” namun seringkali juga bersikap toleran dan tampak “main mata” dengan mereka para pelanggar hukum. Kepentingan dan dampak yang berbeda, yang mereka hadapi, membuat respons aparat Malaysia tidak seperti negara lain anggota ASEAN, yang rakyat dan negaranya lebih banyak dirugikan. Sikap dan respons Singapura sangat tegas dalam menangani isu terorisme dan *cyber crime* yang dinilai lebih mengancam dan merugikan kepentingan nasional mereka daripada dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja domestik.³⁸

Lalu-lintas manusia dan hubungan di antara warganya semakin memperlihatkan dampak yang signifikan bagi hubungan antar-negara dan pemerintah di kawasan. Ini tampak tidak hanya untuk kasus yang bersifat kelompok, seperti yang dialami para pekerja migran yang mudah menimbulkan sentimen nasionalisme, namun juga individual. Kasus mahasiswi Malaysia, yang terdaftar sebagai mahasiswi Universitas Pajajaran, Bandung, Indonesia, telah menimbulkan persoalan besar, sekalipun kemudian ditemukan, kasus tersebut diduga direkayasa. Namun, hebatnya, kasus ini mampu membuat Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Sutarnan dan Menlu Marty Natalegawa untuk turun tangan. Kedua petinggi Pemerintah Indonesia itu telah menghubungi Pemerintah Malaysia, untuk menjelaskan kasus tuduhan pemerkosaan tersebut dan upaya penyelesaiannya.³⁹

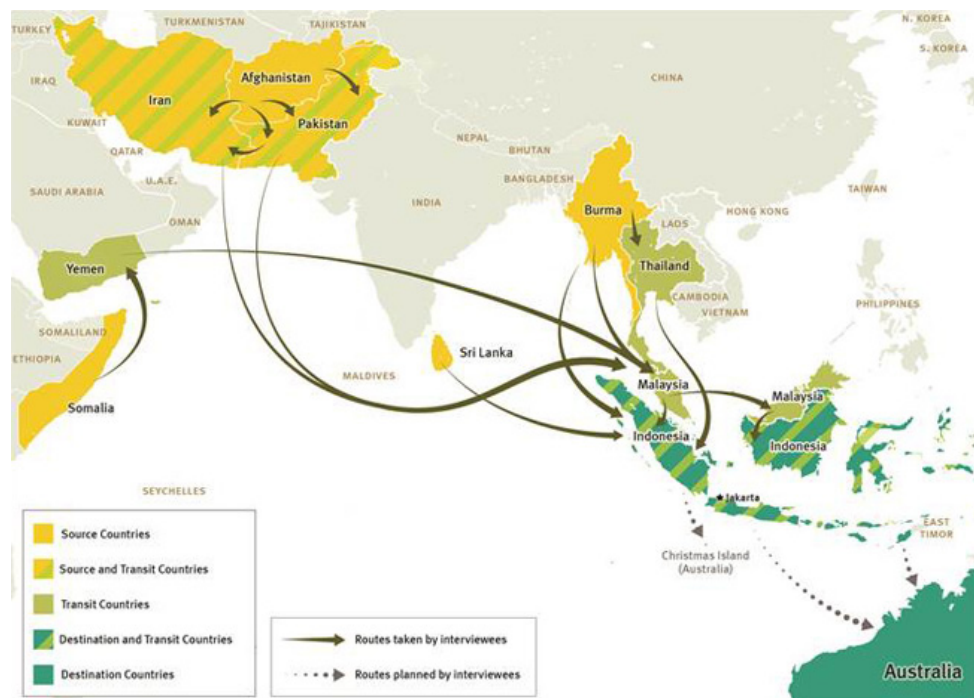
³⁸ FGD dengan Dr. Eddy Mulya, Direktorat Polkam Kemlu tentang “Keamanan Maritim di Kawasan, pada 14 Mei 2014.

³⁹ Lihat, “Kasus Pemerkosaan Mahasiswi Malaysia Diduga Rekayasa,” *Koran Tempo*, 10 Juni 2014, h.10.

Masih dalam kaitannya dengan masalah *illegal trafficking in persons*, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia terusik kembali, setelah pada 23 Mei 2014, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendesak Pemerintah

ketahuan baru tiba di pantai-pantai negerinya, segera dihalau kembali ke laut, untuk diarahkan ke perairan Indonesia, jika diketahui tidak mau kembali ke negara asalnya, atau melakukan deportasi secara sukarela.⁴¹

Peta Negara Asal, Transit dan Tujuan Imigran



Sumber: Human Rights Watch, Juni 2013

Malaysia supaya membebaskan 48 nelayan Indonesia asal Provinsi Sumatera Utara yang masih ditahan lebih 3 bulan akibat tuduhan telah memasuki secara ilegal wilayah perairannya.⁴⁰ Mereka adalah para nelayan tradisional dari wilayah Batubara, Langkat, Deli Serdang, Tanjung Balai, dan Medan, yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencari ikan di kawasan yang diklaim sepihak oleh aparat Malaysia sebagai wilayahnya. Pemerintah Malaysia merasa terusik dengan tuntutan pembebasan seperti itu, yang dianggap telah melecehkan, sekalipun dilakukan oleh Organisasi Non-Pemerintah. Sikap yang lebih keras diperlihatkan Malaysia --hal yang sama ditunjukkan Thailand-- dalam merespons imigran gelap yang masuk dari kawasan lain, khususnya Asia Selatan. Para imigran gelap yang

2. Kasus Indonesia-Australia

Dari banyak kasus penyalahgunaan pekerja domestik yang terjadi, jarang yang mencuat ke permukaan. Namun, perlu diperhatikan, sekali muncul, berdampak signifikan. Dalam kasus masuknya 21 pendatang (migran) ilegal asal RRC ke Viet Nam, akibatnya, aparat berwenang Viet Nam telah melakukan penahanan terhadap para pendatang ilegal tersebut.⁴² Sementara, dalam kasus Erwiana Sulistyaningsih, yang berupaya mengungkap pelanggaran yang terjadi di Hong Kong, tidak saja telah menyadarkan dunia terhadap eksploitasi terhadap pekerja

⁴⁰ Apriadi Gunawan, "Malaysia urged to release Indonesian fishermen," *The Jakarta Post*, May 24, 2014, h.5.

⁴¹ Lihat, antara lain, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-online*, 26 April 2009. Juga, wawancara dengan Robert Ashe, Perwakilan Regional UNHCR di Indonesia, di Jakarta, pada 26 Agustus 2009. Lihat kembali, Poltak Partogi Nainggolan, (ed.) (2009). *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: P3DI, 2009, h. 93.

⁴² James Hookway and Nguyen Pham Muoi, *The Wall Street Journal*, April 21, 2014, h.4.

domestik perempuan, tetapi juga, telah membuatnya masuk sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia yang dibuat majalah *Time*. Protes Erwiana dan aktifitasnya membantu rekan-rekan sekerjanya telah berhasil menggugat eksistensi keadilan dan penegakan hukum dalam sistem politik demokratis Hong Kong, yang telah dibanjiri banyak pekerja migran asal Filipina yang liberal dan demokratis. Mendesak masalah tersebut di kawasan telah membuat 14 negara Asia Pasifik, berkumpul mencari penyelesaian di Bali, Indonesia, dengan kerja sama dengan UNHCR.⁴³ Dalam forum, ini Indonesia menunjukkan sikap tidak hanya agresif, tetapi juga progresif, untuk mencari solusi atas masalah "*boat people*."⁴⁴

Terhadap Australia, dalam isu *illegal trafficking in persons*, belum diselesaikannya permasalahan perbatasan laut Indonesia-Australia rawan menimbulkan permasalahan di antara kedua negara, terutama terkait meningkatnya imigran gelap yang dibawa masuk para nelayan tradisional asal Rote Ndao, dengan menggunakan kapal-kapal kayu mereka, ke Australia. AL Australia mudah menuding kapal-kapal mereka telah memasuki perairan Australia secara ilegal, walaupun mungkin keberadaannya masih di wilayah perairan Indonesia. Begitu pula dengan keberadaan nelayan-nelayan tradisional asal Provinsi NTT, terutama Rote Ndao, yang tengah mencari ikan di wilayah perairan, yang menurut mereka masih berada di Indonesia, yang sering dituding telah mencari ikan dengan telah memasuki perairan Australia secara ilegal. Karenanya sengketa atas pemilikan Pulau Pasir, menurut versi Indonesia, dan Ashmore, menurut versi Australia, negara tetangganya, harus diselesaikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, rawan menimbulkan persoalan seperti selama ini, termasuk yang dikaitkan dengan "*boat people*."⁴⁵

⁴³ Yuliasri Perdani, "Fourteen nations look to resolve regional boat people issue," *The Jakarta Post*, April 21, 2014, h.3.

⁴⁴ Lihat, "RI speaks out on boatpeople amid Australia tension," *The Jakarta Post*, April 22, 2014, h.12.

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Aba Maulaka, pada 22 April 2014. Juga, wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, I Gusti Lanang Ardika, pada 22 April 2014.

Meningkatnya arus imigran gelap yang secara masif masuk ke Indonesia dan Australia menggunakan berbagai jenis moda transportasi akan memuat kawasan Timur-Tengah dan Afrika akan semakin kosong ditinggalkan penghuninya. Sementara, Asia Pasifik, khususnya Indonesia menjadi rawan, karena ia menjadi *bumper* dan sekaligus daerah tujuan para imigran gelap, jika mereka gagal masuk dan menetap di Australia. Kasus *illegal trafficking in person* dengan kapal-kapal kecil (tradisional) dari Indonesia menuju Australia melalui perairan Indonesia Timur, khususnya Provinsi NTT, lebih jauh lagi telah menimbulkan sengketa hukum di pengadilan. Dalam salah satu kasus belakangan, nelayan asal Kupang menang dalam kasus di Pengadilan Federal Australia, setelah ditemukan bukti perusakan terhadap kapal-kapal tradisional asal Kupang oleh aparat Australia.⁴⁶ Ini berbeda dengan kasus beberapa tahun sebelumnya, nelayan asal Kupang tersudutkan posisinya, sekalipun ditemukan bukti adanya pembakaran kapal, yang bertentangan dengan hukum internasional, oleh aparat keamanan laut dan panjaga pantai Australia. Perlakuan yang tidak manusiawi ini sering menimbulkan kritik dan aksi unjuk rasa masyarakat sipil di kedua negara, terutama Australia, yang sangat sensitif dengan isu hak-asasi manusia. Untuk mencegah masuk dan melakukan pemulangan para pelaku *illegal trafficking in person*, aparat keamanan laut Australia menyediakan kapal-kapal kecil bagi para imigran gelap, yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk *survival* dan bahan makanan, untuk mengembalikan mereka ke wilayah Indonesia. Tindakan ini tentu saja melanggar konvensi internasional mengenai penanganan pengungsi. Sebab, sesuai dengan konvensi internasional tentang permintaan suaka, negara-negara harus membuka pintu mereka terhadap permintaan (para pencari) suaka, sebagaimana yang diingatkan UNHCR.⁴⁷

Dari catatan, sejak tahun 2005-2009, ratusan nelayan telah ditangkap di perairan

⁴⁶ Lihat, misalnya, "Nelayan Kupang Menang di Australia," *Kompas*, 24 Maret 2014, h.8.

⁴⁷ "Countries Should Keep Doors Open To Asylum Seekers: UNHCR," *The Jakarta Post*, April 24, 2014, h.4.

Indonesia dan kemudian digiring masuk ke perairan Australia oleh AL Australia. Sebagai langkah kontrol melalui patroli laut dan tindakan pencegahan yang meningkat drastis belakangan, akibat semakin seringnya terjadi penyelundupan manusia melalui perairan di kawasan, AL Australia telah 7 kali melakukan pelanggaran batas (kedaulatan) teritorial laut Indonesia.⁴⁸ Diakui oleh aparat Kepolisian Air Provinsi NTT, imigran ilegal merupakan masalah keamanan maritim utama⁴⁹ yang dihadapi di perairan Indonesia Timur, yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia, antara Samudera Pasifik dan Hindia.

Imigran gelap sering masuk ke wilayah perairan di kawasan ini, karena kegiatan mereka merupakan kerja yang terorganisasi, dan aktivitas bisnis lintas-negara yang menggiurkan, atau ada sindikat internasionalnya, yang melibatkan para pelaku atau aktor non-negara negara asal, transit, dan tujuan, yang melibatkan perantara dan calo lokal. Para pelakunya, imigran gelap yang hendak masuk secara ilegal ke Australia, adalah orang-orang kaya dengan banyak uang di negara asal mereka, yang menggiurkan bagi nelayan tradisional, khususnya asal Rote Ndao, dengan tawaran uang mereka untuk membawa mereka memasuki perairan Australia secara ilegal.⁵⁰

Untuk menangkal para imigran gelap, yang kebanyakan asal negara-negara Timur-Tengah, seperti Afghanistan, Iran, dan Suriah, AL Australia, terutama petugas pengawal pantainya, sudah menunggu di wilayah perbatasan, setelah berhasil mendeteksi dan memantau pergerakan mereka dengan alat-alat berteknologi canggih, seperti radar dan sebagainya. Setelah berhasil mencegat

mereka di perbatasan wilayah perairan dengan Indonesia, aparat keamanan laut Australia lalu menghubungi aparat Indonesia, seperti Basarnas dan Polisi Air, yang telah memiliki kerja sama dalam *Memorandum of Understanding* (MOU), untuk kemudian memulangkan mereka melalui wilayah perairan Indonesia. Mereka bertemu di lokasi titik koordinat tertentu yang disepakati untuk menindaklanjutinya.⁵¹ Di masa lalu, ada kompensasi bahan bakar yang diberikan aparat keamanan laut Australia untuk Polisi Air dan Basarnas, sebelum moratorium kerja sama ini dilakukan Menlu Marti Natalegawa.⁵²

Pada tahun 2013, sebagaimana diungkapkan Kepala Badan SAR Daerah Provinsi NTT, terdapat 34 imigran gelap yang harus mereka evakuasi dari Pulau Pasir (Ashmore Reef), setelah mendapat laporan dari aparat keamanan laut Australia. Kasus imigran gelap yang dipulangkan Australia dari wilayah perairan Rote Ndao, juga harus diurus oleh Basarda NTT. Sementara, di tengah-tengah meningkatnya tuntutan untuk bisa mengevaluasi dan mengurus para imigran gelap itu, dukungan alat kerja dan staf yang dimiliki terbatas. Mereka tidak punya helikopter untuk memudahkan pengawasan dan evakuasi korban, dalam jumlah besar, secara cepat, kecuali dengan kapal berukuran 28 meter milik Basarda Jayapura. Padahal tugas dan tanggung jawab mereka adalah mengawal pulau-pulau terluar dan perbatasan negara dengan Timor Leste dan Australia.

Kebijakan Australia dengan menghancurkan kapal-kapal nelayan tradisional asal Indonesia, terutama NTT, yakni Rote Ndao, juga sangat merepotkan aparat keamanan laut Indonesia. Basarda, dan Polisi Air akan direpotkan untuk tugas evakuasi dan mengawal mereka ke perairan sampai kemudian ke daratan Indonesia. Sebab,

⁴⁸ Keterangan Toto Permanto, dalam FGD di P3DI, pada 2 April 2014. Juga Toto Permanto, 2014, *loc.cit.*

⁴⁹ Wawancara dengan Kolonel (Polisi) Purwoko Y, Direktur Polisi Air Provinsi NTT dan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi NTT, Mayor I. Gede, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT.

⁵⁰ Wawancara dengan Kolonel (Polisi) Purwoko Y, Direktur Polisi Air Provinsi NTT dan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi NTT, Mayor I. Gede, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT, *Ibid.*

⁵¹ Wawancara dengan Ketut Gede Ardika, Kepala Badan SAR Daerah, Provinsi NTT, dan Asistennya, Lukas Y. dan Supriyanto, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT.

⁵² Wawancara dengan Kolonel (Polisi) Purwoko Y, Direktur Polisi Air Provinsi NTT dan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi NTT, Mayor I. Gede, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT.

pekerjaan ini, membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, namun tidak ada atau cukup anggarannya, terutama untuk bahan bakarnya. Sebelumnya, untuk Polisi Air Indonesia ada kompensasi penyediaan BBM untuk kegiatan mereka dalam menangani dan mengevakuasi para imigran gelap yang telah diusir dari wilayah perairan Australia seperti diatur dalam MOU antara Kapolri dengan pihak yang berwenang dari Australia.⁵³ Pihak Basarda dan Polisi Air juga harus mengeluarkan uang untuk memberi makan bagi para imigran gelap selama perjalanan evakuasi. Namun, Pemerintah Australia sampai saat ini masih memberikan pelatihan untuk pengembangan SDM operasi SAR.⁵⁴ Di luar ini, Armada Timur TNI-AL telah membentuk satgas sendiri untuk mengatasi masalah imigran gelap, yang belakangan semakin sering terjadi melintasi Indonesia sebelum menuju ke Australia.⁵⁵ Langkah TNI-AL untuk merespons masalah *asylum seekers* ini patut dipuji, karena tampaknya TNI-AL lebih memahami konsekuensi dari menghormati konvensi internasional tentang pengungsi dan pencari suaka, dibandingkan dengan yang telah diperlihatkan Angkatan Laut dan Coast Guard Australia.

Masuknya para pencari suaka secara ilegal ke Australia melalui perairan Rote Ndao, menimbulkan persoalan serius, yang mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Alasannya, karena aparat keamanan laut Australia memaksa setiap kapal pencari suaka kembali ke wilayah perairan Indonesia, dengan

menggunakan ancaman kekerasan. Mereka urung memperlakukan para pencari suaka itu sebagaimana prosedur yang diatur konvensi PBB mengenai pengungsi. Persoalan muncul, karena Indonesia dianggap sebagai penyebab mengalirnya para pendatang dari berbagai negara yang berupaya memasuki Australia secara ilegal. Sementara, Pemerintah Australia tidak pernah peduli dengan kondisi di Indonesia yang sangat terbatas dengan aparat keamanan laut dan fasilitas pendukungnya di lapangan. Sebab, di pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Rote Ndao, dan juga Rote Ndana, hanya ada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) kecil, dengan peralatan yang sangat terbatas. Dalam sebuah kasus, 45 imigran gelap telah terdampar di Kakaek, Desa Lenupetu, Kecamatan Pantai Baru, Rote Ndao, pada 6 Januari 2014. Para imigran gelap itu, dari wilayah perairan Australia telah digiring anggota AL Australia menggunakan 3 kapal perang dan 6 *speedboat* ke perairan Rote Ndao. Mereka terombang-ambing di lautan dan bertahan selama 1,5 hari, dengan pengawasan ketat tentara AL dan marinir Australia, sebelum diserahkan ke Polres Rote Ndao. Mereka berangkat dari Pulau Kendari di Sulawesi pada 21 Desember 2013 dan sampai di perairan Australia pada 1 Januari 2014. Aparat Polres Rote Ndao mengamankan dan menampung ke-45 imigran gelap tersebut, yang berasal dari Somalia (28 orang), Sudan (9 orang), Mesir (3 orang), Nigeria (2 orang) Yaman (1 orang), Ghana (1 orang), dan Lebanon (1 orang), dengan rincian 39 laki-laki dan 9 perempuan.⁵⁶

Kasus ini berulang hanya selang beberapa bulan. Pada 5 Mei 2014, sebanyak 20 orang pencari suaka, lagi-lagi tanpa identitas dipulangkan kembali secara paksa oleh aparat keamanan laut Australia ke wilayah perairan Rote Ndao. Satu dari kapal mereka telah dibakar Coast Guards negara tetangga Indonesia itu. Mereka terdiri dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai para pencari suaka dari India (16 orang), Nepal (2 orang), dan Albania (2 orang).⁵⁷ Mereka berhasil

⁵³ Wawancara dengan Kolonel (Polisi) Purwoko Y, Direktur Polisi Air Provinsi NTT dan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi NTT, Mayor I. Gede, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT.

⁵⁴ Wawancara dengan Ketut Gede Ardika, Kepala Badan SAR Daerah, Provinsi NTT, dan Asistennya, Lukas Y. dan Supriyanto, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT. Juga, wawancara dengan Kolonel (Polisi) Purwoko Y, Direktur Polisi Air Provinsi NTT dan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi NTT, Mayor I. Gede, pada 24 April 2014, di Kota Kupang, Provinsi NTT.

⁵⁵ Wawancara dengan Danlantamal VII Laksamana Pertama (Pelaut) Deddy Muhibah Pribadi, S.E., MPA, Wadanlantamal Kol. Laut (Pelaut) Lukman H, dan Asisten Operasi, Kol. Sunarno Adi, pada 25 April 2014, di Kupang, Provinsi NTT.

⁵⁶ "Kapal Australia Giring Imigran di Perairan Indonesia Tanpa Izin, *Suara Pembaruan*, 7 Januari 2014, h.A15.

memasuki perairan Australia dengan berlayar menyewa perahu nelayan dari Pulau Rote. Kondisi yang sama terjadi, ketika perahu yang mereka tumpangi akan memasuki perairan Australia, perahu mereka langsung dipaksa kembali ke perairan Indonesia. Para pendatang gelap itu diserahkan ke Polres Rote Ndao dan dievakuasi menggunakan kapal patroli Polisi Air ke Kupang, selain aparat kepolisian itu juga menahan 2 tersangka, yaitu nakhoda dan 1 anak buah kapal, dan barang bukti perahu yang telah disewa dari nelayan tradisional Rote Nado.⁵⁸

Keterlibatan 2 orang asal Indonesia dan perahu yang mereka sewa itu menimbulkan kembali persoalan bilateral yang serius dengan Australia. Buat Menlu Marty Natalegawa, kejadian ini merupakan perkembangan yang sangat serius, mengingat selalu ada aksi kekerasan terhadap para “pengungsi” untuk dikembalikan ke wilayah perairan Indonesia secara paksa. Padahal, dalam kasus yang terjadi sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan keberatannya atas sikap aparat keamanan laut Australia yang tampak arogan. Bahkan, akibat operasi keamanan laut Coast Guard Australia yang tampak arogan itu, PM Australia Tony Abbot membatalkan kunjungannya menghadiri konferensi *Open Government Partnership* di Bali pada hari itu juga, 7 Mei 2014, sebab kejadian tersebut dikuatirkan akan memalukan tuan rumah, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.⁵⁹ Itulah sebabnya, perilaku aparat keamanan laut Australia dan sikap PM Abbot dinilai amat disayangkan, karena telah berdampak pada kerja sama kawasan lainnya, yang bernilai lebih konstruktif dan luas.

Hampir bersamaan, yaitu pada 7 Mei 2014, aparat Kantor Imigrasi Batam, Indonesia, telah menangkap 5 warga negara asing asal Afghanistan, Myanmar, dan Malaysia, karena melanggar aturan keimigrasian.⁶⁰ Mereka,

antara lain, telah mencoba membuat paspor Indonesia dengan memakai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP palsu. Warga asal Myanmar diketahui telah memasuki Indonesia secara ilegal pada pertengahan April tahun 2014. Ia dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan juga menguasai salah satu bahasa lokal yang dipakai di Provinsi NTT. Sementara, warga Malaysia ditangkap karena telah melebihi izin tinggalnya. Sisanya, para warga Afghanistan ditangkap karena tidak memiliki dokumen kependudukan, sekalipun memiliki kartu pencari suaka, yang tentu tidak boleh untuk bebas berkeliaran. Selain untuk transit, tujuan akhir mereka Indonesia, selain juga berusaha mencoba masuk ke Australia, jika memang bisa.

Secara realistis, tidak ada wilayah yang steril sama sekali dari aktifitas para imigran gelap yang berusaha masuk ke Indonesia. Di wilayah paling timur Indonesia, kasus imigran gelap baru pertama kali terjadi di perairan Merauke, yang berbatasan dengan perairan PNG dan Australia Utara. Kasus terjadi pada 14 Agustus 2013, yang melibatkan 23 orang imigran asal Sudan dan Suriah. Mereka menggunakan Merauke sebagai wilayah atau jalur transit, setelah masuk Provinsi Papua dengan menggunakan pesawat umum, dengan tujuan akhir, Australia. Sebanyak 14 orang lagi pencari suaka ke Australia belum diketahui kondisinya, sedangkan 9 lagi ditampung di Posal Torasi, setelah *speedboat* yang mereka tumpangi terbalik.⁶¹ Pihak Lantamal XI, yang menangkap mereka, telah menyerahkan solusi hukumnya pada pihak Imigrasi Merauke.

Masalah imigran gelap yang terus meningkat dan berusaha masuk ke Australia dari wilayah perairan Indonesia, telah mempengaruhi dan mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia. Ini menambah buruknya hubungan setelah ditariknya Dubes Indonesia, Nadjib Riphath Kesoema dari Canberra ke Jakarta, akibat terkuaknya kasus penyadapan telepon

⁵⁷ “Australia Usir 20 Pencari Suaka,” *Media Indonesia*, 7 Mei 2014, h. 14.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ina Parlina, Yuliasri Perdani and Desy Nurhayati, “Migrant Issue Puts End To RI-Oz Thaw,” *The Jakarta Post*, May 7, 2014, h. 1.

⁶⁰ “Imigrasi Batam Tangkap Lima Warga Asing,” *Kompas*, 8 Mei, 2104, h. 8.

⁶¹ Wawancara dengan Asisten Operasi Lantamal XI, Kolonel Laut Purwadi, serta dengan Asisten Inteljen Lantamal XI, Kolonel Laut Yudhi, dan Kepala Bidang Hukum Lantamal XI, Letkol Laut Eko Priyanto, pada 19 Mei 2014 di Merauke, Provinsi Papua.

Pemerintah Australia atas para petinggi negara Indonesia. Terlebih lagi, tindakan sepihak Pemerintah Australia, terutama aparat keamanan laut yang mengembalikan secara paksa para imigran gelap pencari suaka itu ke wilayah Indonesia, dinilai sangat melecehkan dan memberatkan Indonesia. Padahal, kedua negara, telah menyepakati solusinya melalui mekanisme tripartit, melibatkan negara asal, negara transit, seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand, serta negara tujuan imigran, yaitu Australia, yang disepakati dalam Bali Process.⁶² Untuk memperbaiki kembali hubungan kedua negara agar menjadi normal kembali, Presiden SBY dan PM Tony Abbot telah melakukan pertemuan di Batam pada 4 Juni 2014. Pasca-terganggunya hubungan diplomatik kedua negara, kerja sama dalam bentuk patroli, latihan militer, intelijen, dan penanganan imigran gelap telah terhenti.

III. PENUTUP

Realitas dewasa ini memperlihatkan begitu beragamnya aktifitas lintas batas manusia di kawasan Asia Pasifik ini, terutama yang menuju dan melalui wilayah Indonesia. Sebab, posisi Indonesia di antara dunia benua, Asia dan Australia, serta 2 samudera, Pasifik dan Hindia, telah membuatnya begitu strategis, di persimpangan jalur pelayaran dunia. Posisinya yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga, dengan memperhitungkan Federation States of Micronesia, dan panjang garis pantainya, sebagai salah satu yang terpanjang di dunia, telah membuatnya menjadi tempat transit yang ideal. Tidak heran, banyak tempat yang dapat dijadikan jalur atau pintu masuk ke Indonesia, baik masing-masing melalui matra darat, laut, maupun udara, maupun kombinasi kedua atau ketiganya. Demikian pula, baik moda transportasi maupun *modus operandi*, yang digunakan para imigran gelap beragam. Hampir semua pulau, wilayah daratan, perairan dan udara, tidak ada yang bebas untuk bisa dimanfaatkan para aktor lintas

batas non-negara, baik secara legal maupun ilegal, mengingat hampir semua akses masuk dimungkinkan dan telah menjadi semakin terbuka bagi dunia luar, apalagi dengan masih lemahnya mental aparat dan penegakan hukum di lapangan. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinamis, selalu di atas 5 persen, telah menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan akhir para aktor non-negara dalam berbagai aktifitasnya.

Adapun kasus-kasus yang muncul dari aktifitas para aktor non-negara dewasa ini di kawasan cukup beragam. Kasus-kasus ini mencakup aktifitas lintas batas imigran gelap yang bercampur dengan terorisme, pekerja gelap, perdagangan orang, penyelundupan narkoba dan obat terlarang, senjata, serta penyelundupan manusia. Para pelaku migrasi internasional dalam aktivitas mereka melakukan kegiatan menjadi pengungsi dan pencari suaka, dan melakukan kejahatan transnasional. Sekali lagi, meningkatnya arus globalisasi yang semakin membuat dunia terbuka, yang dibantu oleh kemudahan transportasi modern, menyebabkan banyak kasus yang terus terjadi melibatkan pelaku manusia sebagai aktor non-negara. Walaupun demikian, pemerintah dan negara tidak bisa dihapuskan perannya dalam upaya pencegahan dan mengatasi masalah yang ditimbulkannya. Tidak heran, Australia yang jauh sekalipun menjadi sasaran mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, hubungan antar-pemerintah dan negara pun terganggu oleh aliran migrasi internasional yang semakin meningkat dewasa ini, dari negeri-negeri yang bermasalah dan dilanda konflik, negeri asal kaum migran.

Meningkatnya sektarianisme dan konflik sektarian di Timur-Tengah dikuatirkan juga berdampak memperburuk hubungan di antara pemeluk Islam dan antara pemeluk Islam dan non-Islam di Indonesia, yang belakangan mulai terganggu. Meningkatnya gerakan anti-Syiah di kalangan Muslim Sunni Indonesia tidak dapat disangkal ada kaitannya dengan situasi yang berkembang di Timur-Tengah. Bagaimanapun,

⁶² "Abbot Akan Temui Presiden RI di Batam," *Kompas*, 3 Juni 2014, h. 8.

dinamika gerakan Islam di Indonesia selalu ada hubungannya dengan berbagai perkembangan situasi politik di Timur-Tengah yang sedang berlangsung. Selama ini, pengikut Syiah yang berpusat di Iran dan Sunni di Arab Saudi selalu bermusuhan satu dengan lainnya.⁶³ Gerakan anti-Syiah juga menguat di Indonesia, karena pengikut Sunni merupakan mayoritas di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia ini, walaupun sesungguhnya, dalam perspektif tradisi Islam, mereka memiliki tradisi yang berdekatan. Namun, jika kekuatan anti-Syiah di Indonesia terbentuk, kondisi ini akan sangat membahayakan integrasi nasional, sebab akan membentuk front anti-Syiah yang terbesar di dunia. Karena itulah, perlu disadarkan kepada para penganut Syiah dan non-Syiah di Indonesia mengenai bahaya ini.

Di Indonesia, pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap memiliki kekuatan untuk menolak pengajaran yang aneh, terutama yang menyerukan kekerasan kepada kelompok lain yang tidak sepaham. Memburuknya hubungan Sunni-Syiah di Indonesia memang memiliki keterkaitan dengan meningkatnya aktifitas kaum Wahabi, dan belakangan Salafi, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2000-an, dengan maraknya gerakan jihad dalam konflik sektarian di Poso, di Sulawesi Tengah, dan Ambon, di Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah

Arsana, I Made Andi. *Batas Maritim Antar-Negara* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Buzan, Barry. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies In the Post Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf, 1989.

⁶³ Noorhaidi Hasan, ahli radikalisme Islam dari Universitas Islam Nasional (UIN) Yogyakarta, dalam Bambang Muryanto, "Anti-Shia Acts Triggered By Middle East Politics: Expert," *The Jakarta Post*, Januar 23, 2014, h.2.

Buzan, Barry and Lene Hansen. *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Brown, Michael E (ed.) *Grave New World: Security Challenges in the 21st Century*. Washington D.C.: Georgetown University Press, 2003.

Claire, Michael T. and Daniel C. Thomas (1994). *World Security: Challenges for a New Century*. New York: Saint Martinis Press, 2003.

Harvey, Robert. *Global Disorder*. New York: Carroll & Graf. 2003.

Huntington, Samuel P. "The Clash of Civilization?" *Foreign Affairs*, Summer, 1993.

International Terrorism and Migration, Seminar Paper, IOM, Geneve, Switzerland. 2002.

Madu, Ludiyo, Aryanta Nugraha, Nicolaus Loy, dan Fauzan. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Masalah dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Martin, Philip and Susan Martin *Immigration and Terrorism: Policy Reform Challenges*, 2001.

Nainggolan, Poltak Partogi (ed.) *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: P3DI, 2009.

_____. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: P3DI, 2002.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Report of Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, Indonesia, Bali, 26-28 February 2002.

Ricklef, J, Bruce Lockhart, Albert Lau Portia Reyes, dan Maitrii Aung-Thwin *Sejarah Asia Pasifik: Dari Prasejarah sampai Kontemporer*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

- Samantho, Ahmad Y dan Oman Abdurahman et. *Peradaban Atlantis Nusantara: Berbagai Penemuan Spektakuler yang Makin Meyakinkan Keberadaannya*. Jakarta: Ufuk Publishing House., 2011.
- Steans, Jill and Lloyd Pettiford *International Relations: Perspectives and Themes*. Essex: Perason, Education. (2001).
- Terriff, Terry, Stuart Croft, Lucy James, and Patrick M. Morgan. *Security Studies Today*. Cambridge: Polity Press, 1999.
- United Nations Convention on the Law of the Sea*. Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia, 2010.
- Suratkabar**
- Aktor Video ISIS Buron Terorisme," *Media Indonesia*, 5 Agustus 2014.
- "Apakah Indonesia akan Diam?" *Kompas*, 21 Mei 2014.
- "Asia-Pacific Nations Agree On Maritime Code," *The Jakarta Post*, April 23, 2014.
- Aquadini, Sita Planasari ."Angka Pengungsi Internal Tembus Rekor Tertinggi," *Koran Tempo*, 17 Mei 2014.
- "Australia Beri Uang Pencari Suaka yang Pulang," *Koran Tempo*, 24 Juni 2014.
- "Australia Usir 20 Pencari Suaka," *Media Indonesia*, 7 Mei 2014.
- "BNPT: Pendukung NIIS Terancam Hukuman," *Kompas*, 1 Agustus 2014.
- "Buruh Kamboja Pulang," *Kompas*, 16 Juni 2014.
- "Cambodians Flee Thailand As Junta Targets Illegal Labor," *The Jakarta Post*, June 16, 2014.
- Camoens, Austin. "Syndicate Holding 29 Maids As Sex Slaves In Malaysia," *The Jakarta Post*, June 6, 2014.
- Cawley, Tom. "Al-Qaeda Runs Camps On Island In Indonesia," *Financial Times*, 13 December 2001.
- Chandra, Bobby."Polri Kantongi Identitas Aktor Video ISIS," *Koran Tempo*, 2 Agustus 2014.
- "Countries Should Keep Doors Open To Asylum Seekers: UNHCR," *The Jakarta Post*, 24 April 2014.
- "Dari Irak hingga Tawangmangu," *Koran Tempo*, 2 Agustus 2014.
- Fernandez, Celine ."Malaysia, Indonesia Team Up In Sea-Disaster Search," *The Wall Street Journal*, 23 Juni 2014.
- Hookway, James and Nguyen Pham Muoi, *The Wall Street Journal*, 21 April 2014.
- "Imigrasi Batam Tangkap Lima Warga Asing," *Kompas*, 8 Mei 2014.
- Purwanto,"ISIS Dduga Baiat Dua Juta Warga Indonesia," *Koran Tempo*, 3 Agustus 2014.
- Jegathesan, M. "35 Missing In Boat Accidents Off Malaysia," *The Jakarta Post*, 20 Juni 2014.
- "Jumlah Pengungsi Melonjak," *Kompas*, 21 Juni 2014.
- "Kamboja Prihatin Situasi Thailand," *Kompas*, 19 Juni 2014.
- "Kapal Australia Giring Imigran di Perairan Indonesia Tanpa Izin, *Suara Pembaruan*, 7 Januari 2014.
- "Kapal TKI Ilegal Karam di Malaysia," *Media Indonesia*, 19 Juni 2014.
- "Kasus Pemerkosaan Mahasiswi Malaysia Diduga Rekayasa," *Koran Tempo*, 10 Juni 2014.
- Kibtia, Tia Mariatul ."Jihadist In Syria And Their Implication For Southeast Asia," *The Jakarta Post*, 23 Mei 2014.
- Kirkpatrick, David D."Jihadist Rise Reverses The Hopes Of Arab Spring," *The International New York Times*, 20 Juni 2014.
- Leefevre, Amy Sawitta. "Thailand Says No Policy To Sweep Illegal Migrants," *The Jakarta Post*, 17 Juni 2014.

- "Malaysia Deportasi 96 TKI Ilegal Asal Sampang," *Suara Pembaruan*, 30 April 2014.
- "Malaysia Urges US To Review Trafficking Blacklist," *The Jakarta Post*, 23 Juni 2014.
- Missbach, Antje. "Asylum Seekers Stuck In Indonesia," *The Jakarta Post*, 4 April 2014.
- Muryanto, Bambang . "Anti-Shia Acts Triggered By Middle East Politics: Expert," *The Jakarta Post*, 23 Januari 2014.
- Nursalikah, Ani. "Lima TKI Ilegal Tewas Tenggelam," *Republika*, 19 Juni 2014.
- _____. "Eksodus Warga Kamboja Berlanjut," *Republika*, 18 Juni 2014.
- "Pakar Pengganas Beri Amaran JI Masih Jadi Ancaman," *Harian Ekspres*, 24 Pebruari 2005.
- Parlina, Ina, Yuliasri Perdani, and Desy Nurhayati, "Migrant Issue Puts End To RI-Oz Thaw," *The Jakarta Post*, 7 Mei 2014.
- "Pengawasan Imigran Gelap Diperketat," *Republika*, 10 Juni 2014.
- "Perdagangan Manusia: Polda Buru Penjual Perempuan ke Malaysia," *Kompas*, 24 April 2014.
- Perdani, Yuliasri. "With Iraq Gains, ISIS Finds Traction With Indonesian Hard-Liners," *The Jakarta Post*, 14 Juni 2014.
- _____. "Fourteen Nations Look To Resolve Regional Boat People Issue," *The Jakarta Post*, 21 April 2104.
- "Perjanjian untuk Tingkatkan Komunikasi di Laut," *Kompas*, 23 April 2014.
- "Permintaan Suaka ke Indonesia Terus Meningkat," *Kompas*, 12 Mei 2014.
- "Poso Jadi Ajang Laga Teroris Internasional: Jaringan Al-Qaeda Terlibat," *Media Indonesia*, 13 Desember 2001.
- "Profil Abu Jibril," *Media Indonesia*, 9 Juni 2005.
- "Puluhan Remaja Dipaksa Jadi Pekerja Seks di Malaysia," *Koran Tempo*, 23 April 2014.
- Purwanto. "ISIS Dduga Baiat Dua Juta Warga Indonesia," *Koran Tempo*, 3 Agustus 2014.
- _____. "Komunitas Pendukung ISIS Muncul di Daerah," *Koran Tempo*, 1 Agustus 2014.
- "RI Speaks Out On Boatpeople Amid Australia Tension," *The Jakarta Post*, 22 April 2014.
- Saju, Pascal S Bin . "Radikalisme Mengancam Umat Manusia," *Kompas*, 22 Juni 2014.
- Santoso, Ferry. "Mencegah Gerakan Radikal Meluas," *Kompas*, 4 Agustus 2014.
- "Satuan Tugas Cegah Penempatan Ilegal," *Kompas*, 19 Juni 2014.
- Se, Suy. "Cambodia Blamed Worker Exodus Hits 220,000, Thailand," *The Jakarta Post*, 20 Juni 2014.
- "Sudden Cambodian Worker Exodus To Hit Thai Businesses," *The Jakarta Post*, 18 Juni 2014.
- "Sumpah Khilafah di Ladang Tebu," *Majalah Tempo* 2014.
- Supriyantho Khafid, "Jumlah TKI Korban Perdagangan Manusia Meningkat," *Koran Tempo*, 12 Mei 2014.
- "Thailand dan Kamboja Bantah Rumor Razia Migran," *Suara Pembaruan*, 18 Juni 2014.
- "Turis Tingkok Diculik di Sabah," *Kompas*, 4 April 2014.
- "Two RI women trafficked to Malaysia," *The Jakarta Post*, 4 April 2014.
- "Up To 21 Deas As Anti-China Riots Spread In Viet Nam," *The Jakarta Post*, 16 Mei 2014.
- Uramoto, Yoshiteru . "Domestic Workers Across The World Work Like Any Other," *The Jakarta Post*, 17 Juni 2014.
- "20 Nelayan Sumut Ditahan di Penang," *Kompas*, 22 April 2014.
- "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-online*, 26 April 2009.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kolega peneliti masalah-masalah hubungan internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi (P3DI) DPR RI, dan Dr. Ganewati Wuryandari,

MA dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan naskah tulisan ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia dan mengorbankan waktunya yang berharga untuk diwawancarai.